



Akademisi Diminta Berperan Atasi Kesenjangan Ekonomi

UMBULHARJO (MERAPI) Kalangan akademisi di Kota Yogyakarta diminta berperan mengatasi kesenjangan ekonomi. Salah satunya melalui penelitian mengenai pengurangan kesenjangan ekonomi.

"Kami harapkan peran perguruan tinggi membantu mengatasi persoalan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang masih tinggi," kata Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, usai membuka sosialisasi dewan riset daerah dan dana penelitian 2020, Rabu (27/2).

Menurutnya penanganan kesenjangan ekonomi di Kota Yogyakarta tidak mudah. Pasalnya Kota Yogyakarta yang mengandalkan industri jasa memiliki karakter yang berbeda dengan kabupaten dan kota lain. Dicontohkan daerah lain antara sektor pertanian tidak terkait dengan ekonomi menengah ke atasnya. Tapi di industri jasa, antara kelompok masyarakat yang selama ini ada dengan industri di atasnya melekat. Misalnya saat hotel naik berlipat-lipat akan berdampak ke kelompok masyarakat pelaku kecil. Tapi kesenjangan makin jauh," paparnya.

Pihaknya menegaskan, selama ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Tapi kesenjangan ekonomi masih tinggi. Dicontohkan dalam hal kemiskinan dia menilai parameternya perlu ditambah terkait tradisi dan budaya. Dia menjelaskan parameter kemiskinan yang diukur dari pengeluaran Rp 425 ribu-bulan baru dianggap miskin, kurang tepat. Alasannya kebudayaan sebagian masyarakat Yogyakarta yang kadang makan secukupnya.

Ini bagian dari yang harus diteliti. Yogyakarta memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) dan angka harapan hidup tinggi. Tapi angka kemiskinan dan kesenjangan cukup tinggi. Ini tidak nyambung, apa ada problem dalam ukuran kemiskinan," tuturnya.

Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, perguruan tinggi diminta merumuskan penelitian dan rekomendasi agar kemiskinan dan kesenjangan. Misalnya agar kemiskinan tidak hanya dilihat dari angka konsumsinya, tapi juga indeks pembangunan masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Heri Karyawan mengakui penelitian harus disinergikan dengan permasalahan di Kota Yogyakarta. Termasuk masalah kemiskinan dan kesenjangan dibutuhkan penelitian-penelitian terkait penanganan kemiskinan. "Memang perlu disinergikan, karena salah satu rencana strategis pembangunan adalah pengentasan kemiskinan," ujar Heri.

Dia mengutarakan Pemkot Yogyakarta selama ini sudah memfasilitasi penelitian bersama perguruan tinggi lewat jaringan penelitian dan Forum Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Kota Yogyakarta. Kini juga akan disinkronkan dengan dewan riset daerah yang merupakan turunan dari aturan terkait dewan riset nasional. Pemkot Yogyakarta mengalokasikan sekitar Rp 200 juta untuk anggaran penelitian di tahun 2019.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005